

Bab 1

PENDAHULUAN

Oleh:

*Samsul Bakri, Christine Wulandari, Slamet Budi Yuwono, Hari Kaskoyo, Indra Gumay
Febryano dan Rahmat Safe'i*

Pembangunan berkesinambungan telah menjadi topik sentral bagi setiap negara di seluruh belahan dunia manapun sejak kesepakatan dapat dicapai dalam KTT Bumi yang pertama kali diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992. Sebagai subsistem dari sistem pembangunan nasional setiap negara, maka pembangunan sektor kehutanan sejak dua dasawarsa terakhir juga mengambil aras kiblat keberkesinambungan (SFM: *Sustainable Forest Manajemen*) termasuk di Indonesia. Secara generik makna yang terkandung di situ adalah pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya hutan (SDH) untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa **mengorbankan** kepentingan generasi yang akan datang. Pesan moral dari SFM ini menjadi subyek perdebatan yang meruncing menyangkut mulai dari tataran yang bersifat filosofis dalam perancangan pengembangan kebijakan sampai ke tataran praktis di level tapak yang melibatkan individu pelaku sebagai aktor pembangunan.

Perdebatan seperti itu wajar berkembang bukan hanya di kalangan ilmuwan, melainkan juga kalangan para *policy makers*, birokrat, pelaku bisnis, maupun penggiat lingkungan. Bahkan perdebatan itu sering sampai meruncing, tetapi pada berbagai aspek juga mengerucut kepada satu pandangan bersama. Mengingat konsep keberkesinambungan itu menyangkut dimensi waktu yang tidak dapat balik (*irreversible*) sifatnya, maka dialektika dan perdebatan (*discourses*) tersebut penting untuk terus difalitisasi dan

dilanjutkan agar dapat dicapai pemahaman bersama yang hakiki tentang makna dan implikasi dari SFM itu sendiri. Termasuk untuk memperoleh indikator-indikator kebersinambungan yang kukuh (*robust*) sifatnya dalam melakukan perencanaan sampai evaluasi terhadap suatu praktek SFM mulai dari level nasional sampai di level tapak. Dengan begitu diharapkan dapat dihindarkan berbagai bentuk kesalahan yang berujung pada kegagalan yang dampaknya harus ditanggung oleh generasi yang akan datang. Dengan kata lain bahwa dalam aras SFM *moral hazard avoidance* haruslah menjadi perilaku bagi setiap individu generasi sekarang, baik mulai dari aktor di level perumus kebijakan, birokrat tingkat atas, birokrat tingkat lapangan sampai pada individu dalam setiap komunitas. Untuk tujuan berkontribusi pada pengembangan *discourses* semacam inilah antara lain kami tulis berbagai pemikiran dalam buku ini.

Subjek pokok dalam buku ini adalah sumberdaya alam khususnya sumberdaya hutan (SDH), yang secara generik dapat dimaknai sebagai suatu ekosistem yang telah berperan peran bagi perkembangan setiap peradaban dari setiap bangsa. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat berkembang tanpa SDA ini, baik itu SDH yang ada di wilayahnya sendiri seperti Indonesia ataupun yang memanfaatkan imbasan (*positive externality*) dari negara sebelahnyanya seperti Singapura atau pun negara-negara industri maju lainnya. Baik dimulai dari negara yang terbelakang sampai menjadi negara industri maju, aktivitas setiap individu di setiap wilayah suatu negara senantiasa selalu bergantung pada ekosistem hutan, baik secara langsung atau pun tidak. Aktivitas individu tersebut yang pertama kali tidak lain adalah mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika seorang individu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka disebut sebagai individu yang sejahtera (*better off*).

Menurut Osoianu (2016) ilmu yang mengkhususkan diri untuk mempelajari perilaku individu dalam mencari nafkah disebut sebagai Ilmu Ekonomi (*Economics*). Berasal dari kata Bahasa Yunani *Oikos* (lingkungan tempat tinggal) + *Nomos* (mencari nafkah), yang pada tataran yang paling kontemporer adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengakumulasi kapital menjadi aset-aset kepemilikan atau portofolio kekayaan diridengan cara mengekstrak dan mengembangkannya dari

lingkungan sekitarnya. Menurut kedua pakar ini pulalah tidak ada satu individu makhluk hidup pun yang dapat berdiri sendiri dan terlepas dari lingkungan sekitarnya, melainkan senantiasa berinteraksi membentuk suatu sistem kesetimbangan dinamik (*steady state of equilibrium*). Fenomena hubungan tersebut secara generik dikenal sebagai ekosistem, yang berasal dari kata Bahasa Yunani juga *Oikos* (lingkungan tempat tinggal) + *system* (yaitu kumpulan entitas individu yang saling berinteraksi sehingga bila ada satu komponen berubah maka akan menggeser arah interaksi keseluruhan). Artinya bagi Osoianu(2016) meyakini bahwa dewasa ini hanya di bumi lah yang dapat ditemukan sebagai tempat untuk berevolusi dan berkembangnya suatu ekosistem. Karena itu kedua pakar ini memandang Ekologi (ilmu ekosistem) sebagaimana uang yang bersisian dengan Ilmu Ekonomi, yang berarti pula bahwa tidak ada ekosistem tidak ada kegiatan perekonomian untuk melakukan akumulasi kapital.

Dalam pandangan Maslow (lihat Gerrow, 1992) kebutuhan setiap individu manusia itu berjenjang atau berhierarki. Dengan urutan yang klimaks hirarkhi itu berturut-turut meliputi: (i) kebutuhan dasar (*psychological needs* seperti makan; minum; seksual; tempat tinggal dll), (ii) kebutuhan rasa aman dan nyaman (*safety need*); (iii) kebutuhan untuk dicintai (*love and belonging need*); (iv) kebutuhan untuk dihargai (*esteem need*); dan (v) kebutuhan kebergunaan bagi orang lain (*self actualization*) seperti menjadi tokoh politik, peraih Hadiah Nobel dan sebagainya. Kebutuhan dasar sebagai hirarkhi pertama dalam spektrum kesejahteraanala Maslow ini sifatnya relatif tidak beragam antarindividu. Sedangkan hirarkhi di atasnya cukup beragam bahkan bisa sangat beragam. Kecuali itu, pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan itu juga berjenjang. Bila kebutuhan dasar sudah dipenuhi (terpenuhinya kesejahteraan level pertama) maka secara umum akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hirarkhi ke dua dan seterusnya. Berbeda dengan kebutuhan pada dunia hewani, karakter pemenuhan kebutuhan bagi setiap individu manusia itu pada umumnya tidak dapat dibatasi. Artinya sekalipun sudah mencapai level kesejahteraan tertentu perilaku melakukan ekstraksi ekosistem oleh manusia terus berlangsung. Dengan kata lain aspirasi manusia untuk mengaktualisasikan dirinya terus berkembang tanpa pernah dapat dibatasi. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak dapat dibatasi inilah maka setiap

pembangunanberkesinambungan haruslah menjadi paradigmanya, termasuk dalam praksis pembangunan kehutanan yang diartikulasikan dalam manajemen SDH yang berkesinambungan (SFM).

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut maka akan selalu bermuara padaaktivitas individu manusiasebagai aktor yang *selfi sh* yang senantiasa terdorong untuk mengejar *pleasure* dan menghindari resiko atau *risk averse* (Atkinson, 1997). Dalam keadaan ini individu cenderung untuk melakukan ekstraksi terhadap setiap manfaat dari SDA dan mengabaikan dampak negatifakibat ekstraksi tersebut yang wujud akumulasi akhirnya berupa kerusakan sumberdaya alamdan lingkungan.Artinya dalam setiap ekstraksi manfaat SDA (yang akan selalu mengeser kesetimbangan ekosistem tersebut) banyak atau bahkan umumnya setiap individu dalam masyarakat akan berperilaku *selfi sh*.Dengan kata lainakan selalu terjebak dalam perilaku untuk mengutamakan penumpukankapital tanpa memperdulikan dampak kerusakan ekosistem.

Mengingat kumulasi individu secara agregatitu tidak lain adalah masyarakat, jika demikian, maka ketidakadilan sosial ekonomi akan menggejala: masyarakat penumpuk kapital (*baca*: kapitalis) akan mengambil sebagian besar manfaat dari setiap ekstraksi SDH dengan mengabaikan kerusakan lingkungan. Masyarakat setempat yang harus memikul kerusakan lingkungan dan akan semakin eksploitatif terhadap SDH demi hanya untuk mempertahankan kehidupan level subsistennya. Fenomekonflik manusia dengan satwa liar, ledakan hama dan penyakit tanaman, ledakan penyakit pada manusia dan ternak, banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, kelongsoran tanah, erosi yang akut, sedimentasi (pada waduk, sungai, danau dan badan-badan air lainnya) merupakan fenomena kerusakan ekosistem yang mungkin terus akan semakin eskalatif ke depan, bahkan mungkin harus diwariskan kepada generasi mendatang. Gejala ketidakberkesinambungan praktek pengelolaan sumberdaya hutan ini masih sangat kentara di banyak kawasan di Indonesia. Gejala ini adalah bukti bahwa SFM yang telah kita terapkanmenjadi subjek keraguan apakah telah benar-benar menjadi kesatuan pemahaman oleh para *stake holder* pengelolaan hutan. Patut kita pertanyakan kinerja adopsi SFM mulai dari tataran fi losofi s sampai ke tataran praktek manajemen di level tapak.

Untuk tujuan mengasah dan mempertajam dialektika pemikiran kritis menuju pencarian semacam konsensus kesepakatan bersama mengenai SFM itu, maka kami memandang perlu memberikan kontribusi pemikiran ke dalam 6 topik dalam buku ini. *Pertama* adalah tentang pilihan ideologi lingkungan yang difokuskan pada *discourses analysis* mengenai pentingnya untuk memilih ideologi yang tepat bagi pengembangan ketiga jenis fungsi hutan: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi bahkan pada hutan hak. Topik ini terutama ditujukan kepada para *forest planner* yang dalam melayani *client*-nya (yaitu *policy makers*) senantiasa dihadapkan pada pilihan antara pemanfaatan hutan untuk tujuan penghela kesejahteraan generasi sekarang secara cepat ataukah pada pilihan untuk mengikuti kapasitas sangga (*buffering*) ekologis sehingga kesehatan SDH tetap terjamin (*resilient*) terhadap berbagai guncangan ekosistem sebagai dampak dari praktek pengelolaan itu sendiri.

Dalam topik ini diulas tentang dua ideologi lingkungan utama yaitu (*Technocentric* dan (*Ecocentric* yang saling antagonis. Ideologi pertama bertolak dari keyakinan (*belief*) yang memandang bahwa dengan kemampuan teknokratik yang dikuasai sampai saat ini kaum penganut ideologi *Technocentric* ini meyakini bahwa SDH dapat berkesinambungan jika dipandang pada sisi nilai instrumennya, perlu dieksploitasi secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan manusia tanpa perlu ada kekhawatiran akan kerusakan ekosistemnya. Penganut ideologi ini terbagi kedalam dua bagian *Technocopian* yang ekstrim kiri dan *Technocommodating* yang masih mempertimbangkan penting konservasi. Keyakinan yang berlawanan adalah ideologi *Ecocentric* yang memandang bahwa SDH seharusnya dihargai karena nilai intrinsiknya. Kelompok ini juga terbagi dalam dua kelompok yaitu *Deep ecologist* dan *Communitarianist*.

Bagi kaum ekstrim kanan *Deep ecologist* pemanfaatan SDH beserta isinya haruslah minimal, bahkan unsur abiotiknya pun perlu diproteksi. Walaupun kaum ini mulai berkembang signifikan jumlahnya di negaranegara Eropa Barat, tetapi sub ideologi ini hampir tidak mungkin diadopsi oleh para *forest planner* dalam merancang SFM di negara-negara berkembang yang masih memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada kebutuhan untuk pemanfaatan SDH yang cukup intensif. Muncul kemudian sub ideology *Communitarianist* yang agak longgar dari pada

E_deep ecologist walau masih lebih ketat dibandingkan *T_accomodating*. Pesan utama dari topik ini agar *paraforest planner* bertindak profesional dalam menerapkan pilihan ideologi dalam merancang SFM, tidak terkooptasi kepada keinginan *client* sekalipun dihadapkan pada tekanan.

Untuk membangun ketajaman intuisi para pengelola hutan dalam perancangan SFM, maka pada topik *ke dua* kami hadirkan bahan diskusi yang difokuskan pada SDH sebagai penghela kesejahteraan. Terutama di negara-negara tropika basah yang sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan pada ekstraksi sumberdaya alam, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi *limiting factor* bagi pemenuhan kesejahteraan pada yang lebih atas. Bahkan faktor ini terus bekerja pada setiap level kesejahteraan seperti yang dipostulatkan secara umum oleh Maslow (Garrow, 1992) tersebut di atas. Adanya surplus ekonomi (*baca*: nilai lebih dari pendapatan setelah dikurangi pengeluaran) bagi parapenduduk miskin maka akan menjadi *breakthrough* untuk menapaki ke level kesejahteraan berikutnya. Apalagi yang menyandarkan hidupnya dari wilayah suboptimal seperti kawasan hutan, yang jauh dari layanan publik termasuk layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan investasi ataupun layanan administratif kependudukan dan sebagainya.

Berbagai aset yang dimiliki yang terdiri dari aset sosial, aset manusia, aset alam, aset fisik dan aset keuangan harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai penghidupan (*livelihood*) yang lestari. *Livelihood* akan menjadi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) jika dapat menangani kemiskinan dan memelihara atau meningkatkan kemajuan-kemajuan serta meningkatkan aset-aset untuk masa depan generasi yang akan datang tanpa merusak sumberdaya yang menjadi tumpuannya. Dapat pula diartikan merupakan suatu syarat bagi berkembangnya kelompok masyarakat yang telah mencapai level kesejahteraan yang lebih tinggi. Begitu seterusnya seperti yang digambarkan oleh Maslow (Garrow, 1992). Artinya bila suatu pengelolaan SDH mampu memberikan kinerja *sustainable livelihood* seperti itu maka dapat menjadi salah satu indikasi bagi tercapainya harapan suatu SFM yang sejatinya. Kerangka kerja *sustainable livelihood* dari DFID (DFID 2009) yang dimodifikasi dapat digunakan untuk menganalisis pengelolaan hutan yang salah satunya adalah kegiatan pemanfaatan hutan.

Untuk memberikan pijakan bagi berlangsungnya suatu aktivitas pemanfaatan SDH yang menjamin peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan (*sustainable livelihood*) seperti itu, maka diperlukan suatu perencanaan sampai pada level tapak pengelolaan yang berasaskan pada suatu sistem biofisik yang menjadi tempat berlangsung dan berkembangnya berbagai ekosistem, dengan ekosistem hutan sebagai bagian yang esensialnya. Kebutuhan ini tidak bisa dielakkan mengingat setiap SDH tidak ada yang tidak berpijak pada suatu sistem lahan. Sistem biofisik yang dimaksud di sini tidak lain adalah sistem hidrologi daratan yang dikenal sebagai sistem daerah aliran sungai (DAS). Pentingnya suatu perencanaan berasaskan DAS karena dalam sistem ini terus berlangsung siklus hidrologi sepanjang masa yang tunduk pada hukum grafitasi. Air sebagai unsur kehidupan disuplai oleh proses presipitasi, sebagian diuapkan secara langsung, sebagian mengalir di permukaan tanah, sebagian meresap ke dalam tanah (merupakan bagian air presipitasi yang terpenting bagi kehidupan), diserap oleh perakaran untuk fotosintesis dan evapotranspirasi dan sebagian mengalir secara perlahan mengikuti kemiringan lapisan bumi yang dimanfaatkan untuk segala proses kehidupan bagi berbagai ekosistem yang berkembang di elevasi bagian bawah.

Bagian air yang terakhir ini yang bertanggung jawab pada *life support sistem* bagi kehidupan di elevasi bagian tengah ataupun di bagian bawah atau hilir untuk menekan banjir, memelihara kesuburan tanah, mencegah erosi, sedimentasi dalam badan-badan perairan, untuk tenaga listrik, irigasi dan berbagai kebutuhan di zona ekologis manusia. Bersamaan dengan keragaman elevasi dalam suatu sistem DAS, maka distribusi air dari hulu sampai ke muara merupakan prasyarat bagi berkembangnya berbagai ekosistem. Keberagaman berbagai jenis ekosistem di suatu hamparan tersebut juga merupakan salah satu indikator kuat bagi keberlanjutan. Oleh karena itu pada topik ke Tiga dalam buku ini kami ajukan bahan diskusi tentang pentingnya pemahaman sistem DAS bagi pengelolaan SDH agar dapat mencapai keberkesinambungan. Pemanfaatan SDH akan menjamin terwujudnya SFM jika perencanaannya didasarkan pada sistem DAS yang bersangkutan.

Perencanaan pengembangan pemanfaatan sumberdaya menggunakan asas sistem DAS ini dapat digolongkan sebagai perencanaan rasional, yang merupakan jenis perencanaan yang paling ideal dibandingkan dengan berbagai rezim perencanaan lainnya seperti *incremental planning*, *adaptive planning*, *participatory planning* dsb. Namun dalam konteks pengelolaan SDH, bagus atautkah buruknya suatu sistem perencanaan hanya dapat *dijudge* melalui respon hasilnya atau kinerjanya dalam jangka waktu tertentu pelaksanaannya, melalui suatu sistem evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh dengan menggunakan indikator yang kongkret dengan metode yang tidak rumit melainkan harus relatif sederhana dalam pengerjaannya. Untuk memberi tantangan lebih lanjut kepada para pembaca dalam proses *inquiring* suatu metode evaluasi seperti itu, pada bagian *ke Empat* ini kami sajikan topik tentang *Konsep Kesehatan Hutan*, yang merupakan suatu hibrid yang relatif baru dari cabang manajemen SDH.

Mengingat masih relatif baru, maka kosep Kesehatan Hutan masih merupakan ladang yang belum banyak diolah untuk dijadikan *tool* dalam evaluasi terhadap suatu praktek manajemen hutan. Secara ringkas dapat diungkapkan bahwa kesehatan ekosistem hutan adalah kelenturan (*resiliency*) suatu ekosistem hutan terhadap adanya guncangan ekologis (*ecological shocks*) baik yang disebabkan oleh faktor alami (seperti agin, gempa bumi, *pest disease* dll) maupun oleh faktor antropogenik (seperti pembabatan hutan, *accelerated erosion*, kelongsoran, banjir dll) seperti tersebut di atas. Dalam konteks ini ekosistem hutan yang sehat adalah hutan yang masih tetap mampu memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat ekologis tanpa mengakibatkan merosotnya fungsi hutan secara nyata sebagai *suplier* barang dan jasa ketika mengalami gencangan ekologis sampai terjadi *self recovery* menuju kesetimbangan ekosistem yang mantap kembali. Jika manfaat ekonomi dan manfaat ekologis tetap dapat dipenuhi, maka dengan sendirinya manfaat sosial SDH juga demikian. Argumentasi ini sesuai dengan pemikiran Osoiano (2016) tersebut di atas bahwa ekonomi dan ekologi adalah sisi mata uang yang sama. Konsep dan audit kesehatan hutan ini haruslah menjadi prasyarat terpenting dalam mengembangkan SFM yang sejatinya.

Bila demikian postulat yang harus ditegakkan dalam konsep kesehatan hutan, maka dewasa ini di Indonesia umumnya dan di Provinsi

Lampung khususnya, tidak banyak dijumpai ekosistem hutan yang sehat. Dengan kata lain banyak sekali suatu praktek pengelolaan hutan yang mempunyai indikator keberlanjutan yang sangat lemah. Seperti telah diungkap di atas, adanya fenomena gagal panen akibat serangan hama penyakit pada tanaman budi daya, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, erosi yang jauh melampaui ambang dan sedimentasi (pada waduk; bendungan; muara-muara sungai dan badan-badan air lainnya), kebakaran hutan, eskalasi konflik manusia dengan satwa liar serta merebaknya berbagai penyakit baru pada manusia dan ternak adalah sederetan fenomena yang menggambarkan makin merosotnya kesehatan ekosistem hutan kita.

Kemerosotan tersebut sangat ekskalatif dalam dua dasawarsa terakhir yaitu sejak desentralisasi tata pemerintah berlangsung (Bakri, 2012). Tidak bijak jika kita terburu-buru menyalahkan kesepakatan politik nasional tentang desentralisasi itu. Karena fenomena kemerosotan tersebut merupakan andil dari banyak pihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Atkinson (1997) tersebut di atas bahwa karakter individu manusia umumnya *selfish* dan *myopic*, tidak mampu menerawang ke dimensi waktu yang jauh kedepan. Dengan begitu maka banyak para *policy maker* yang mengambil jalan pintas untuk segera memperoleh manfaat ekonomi SDH secara cepat tanpa menyadari bahwa kapasitas teknokratik dan ipteks yang dikuasai kini belum cukup memadai untuk melakukan substitusi teknologi terhadap degradasi komponen ekosistem sebagai dampak perilaku eksploitatif tersebut. Ambisi seperti itu juga dipercepat oleh mental para *forest planner* yang kurang profesional, hanya menjadi pembenar bagi para *client*-nya yaitu para *policy maker*.

Keadaan ini makin akut yang melahirkan suatu fenomena tragedi barang publik (*the tragedy of the common*) seperti diungkapkan Hardin (1968) maupun Crowe (2003). Fenomena ini terjadi pada esensinya juga karena lemahnya berbagai institusi yang ada di dalam masyarakat. Apalagi dengan institusi pasar, yang karakteristiknya sangat begitu otonom, yang sangat dikendalikan oleh segelintir orang (*baca: kapitalis*) sehingga sering terjadi *market buyers* yang bermuara pada perilaku eksploitatif masyarakat marjinal terhadap ekosistem hutan sampai ke kawasan-kawasan konservasi yang ketat. Bahkan kerusakan lingkungan telah dipolitisir (*politicking*) oleh untuk

kepentingan beberapa aktor melalui berbagai propaganda sampai ke tingkat global. Untuk memfasilitasi para pembaca dalam mengurai kekusutan berbagai persoalan tentang *moral hazard*, *market hegemonic*, eksploitasi sumberdaya, degradasi ekosistem, serta peran aktor-aktornya maka pada bagian *ke Lima* ini kami sajikan ke bahan diskusi tentang *Ekologi Politik*.

Diharapkan setelah mencermati topik ini akan muncul semacam stimulasi pada diri para pembaca untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial ekonomi dalam pengelolaan ekosistem hutan yang menjadi kristal yang esensial dalam perjuangan ekologi politik. Lebih lanjut diharapkan juga dapat muncul berbagai stimuli pemikiran tentang bagaimana merancang berbagai strategi pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam meraih keadilan sosial tersebut melalui gerakan masa yang masif. Karena itu pada puncaknya kami sajikan topik *ke Enam* yaitu tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi untuk merancang SFM.

Dengan mengambil ceruk pembahasan tentang kawasan hutan konservasi diharapkan para pembaca buku dapat memperoleh stimulasi pemikiran tentang strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial mulai dari masyarakat yang paling marjinal, yang terpaksa harus terdesak ke kawasan yang suboptimal seperti di wilayah penyangga taman nasional, taman hutan raya, atau pun hutan lindung. Masyarakat yang banyak menggantungkan kehidupannya di kawasan-kawasan paling fragil dari sisi resiko akan lenyap plasma nutfah ini sudah selayaknya untuk diposisikan paling atas urgensinya dalam upaya mencari perumusan strategi untuk memperjuangkan keadilan sosial ekonomi mereka. Setelah itu, pemberdayaan masyarakat adalah tahapan urgensi berikutnya agar kemudian sadar akan hak-haknya dan secara sukarela berpartisipasi merasakan pentingnya mempertahankan kelestarian ekosistem tempat mereka melangsungkan perikehidupannya. Keberhasilan dalam menggerakkan partisipasi secara masif masyarakat di zona penyangga dari kawasan konservasi yang ketat seperti ini dapat dijadikan model bagi kawasan hutan lindung secara relative lebih mudah apalagi pada kawasan-kawasan hutan produksi. Namun bila belum berhasil maka ancaman akan lenyapnya ekosistem hutan beserta *non use values* atau pun *bequest values*

yang terkandung di dalamnya akan terus membayangi kita. Dengan kata lain, bahwa praktek SFM ke depan akan terus dibayangi resiko yang besar tentang kiamat Malthus maupun lenyapnya ekosistem di bumi seperti yang dipostulatkan sebagai *Gaia Hypothesis* oleh kaum *Deep Ecologists* (lihat Kerry *et. al.*, 1994).

Dengan demikian setelah merampungkan semua topik yang disajikan dalam buku ini maka diharapkan para pembaca akan terprovokasi untuk berkontribusi dalam membangun arsitektur pemikiran tentang konsep SFM yang paling ideal. Selanjutnya untuk turut berkontribusi dalam merancang pelaksanaan SFM di Indonesia atau pun di belahan dunia manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, R. L. 1997. *Introduction to Psychology*. Terjemahan. Ed.8th. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bakri, S. 2012. Fungsi intrinsik hutan dan faktor endogenik pertumbuhan ekonomi sebagai determinan pembangunan wilayah Provinsi Lampung. *Disertasi*. SPS. IPB Bogor.
- DFID. 1999. Sustainable livelihoods guidance sheets. Department for International Development, London.
- Crowe, B. L. 2003. The tragedy of the commons. *Science* 166:1103-1107.
- Gerrow, G. 1992. *Psychology: An Introduction*. John Wiley & Sons. New York.
- Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science* 162:1243-1248.
- Kerry, T., D. Pearce, dan E. Rubinfeld. 1994. *Economics of Natural Resource*. Simon & Shuster. Int. Group.
- Osoiano, D. 2016. It's all about economics -*The urban ecology in T.S. Eliot's the waste land*. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Vol. 16* (1):218-222.

Bab 2

PILIHAN IDEOLOGI LINGKUNGAN DALAM PRAKSIS MANAJEMEN SUBERDAYA HUTAN BERKESINAMBUNGAN

Oleh:

Samsul Bakri

2.1 PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan di Indonesia mulai memasuki babak baru yang mantap setelah DPR meratifikasi kasi UNFCCC (sebagai salah satu buah dari KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992) menjadi undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1994, walaupun sebelumnya kita telah mengundang UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dari tonggak itu kemudian *Sustainable Forest Management* (SFM) telah menjadi *mainstream* pengelolaan SDH di Indonesia. Hutan dalam teori ekonomi dipandang sebagai sumberdaya, sesuatu yang dapat membangkitkan kesejahteraan baik secara fisik (mulai kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan) sampai kebutuhan puncak berupa kebergunaan bagi fisik lain atau *self actualization* seperti yang dideskripsikan oleh Abraham Maslow (Garrow, 1992). Dalam memanfaatkan SDH untuk membangkitkan kesejahteraan, kata keberlanjutan *sustainable* merupakan kata kunci. Tetapi kata ini mempunyai dimensi waktu: hanya akan dapat diketahui pada masa mendatang akan kebenarannya. Oleh karena itu keberlanjutan harus menjadi perilaku bagi

semua agen perekonomian tak terkecuali bagi yang menggantungkan hidup pada SDH ini. Bila ada satu mata rantai agen tersebut yang tidak berperilaku yang mengarah kepada keberlanjutan maka, eksternalitas negatif sebagai dampak buruk dalam pengelolaan SDH akan mengancam keberlanjutan tersebut.

Mengingat SDH hutan merupakan SDA yang merupakan anugerah yang sangat luas dan karena itu sumberdaya ini selama berabad-abad telah menjadi *public domain*, sehingga hak pemerintah merupakan satu-satunya agen yang sangat dominan dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan SDA ini. Dalam konteks ini perilaku pemerintah (sebagai pemegang otoritas kebijakan publik) akan sangat mempengaruhi nasib keberlanjutan SDA ini, karena setiap keputusan (*policy*) yang bertalian dengan pengaturan pemanfaatan SDA ini akan mengikat perilaku setiap individu yang berada dalam wilayah kekuasaan publik tersebut.

Lebih lanjut bila dilacak ke arah hulu, maka keberlanjutan tersebut akan sampai pada pangkal penentu keberlanjutan itu yaitu keyakinan (*belief*) yang dimiliki oleh perumus dan penentu kebijakan tersebut. Dengan kata lain, karena keberlanjutan itu secara pasti hanya dapat diketahui nanti di masa yang akan datang, setidaknya setelah satu siklus pengelolaan SDA tersebut, maka ideologi yang dianut oleh para perumus dan penentu kebijakan itulah merupakan hulu segala aspek perencanaan agar para agen pengelola berperilaku yang menuju kepada terminal di masa mendatang yang dikenal sebagai keberlanjutan tersebut.

2.2 PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP IDEOLOGI LINGKUNGAN

Secara generik ideologi dapat difahami sebagai suatu keyakinan (*belief*) yang dapat 0 makna suatu *belief* dari suatu ideologi lebih lanjut perlu diulas tentang ideologi lingkungan disertai jenis-jenis atau bentuk-bentuk ideologi lingkungan yang telah berkembang secara universal.

2.3 KLASIFIKASI IDEOLOGI LINGKUNGAN DALAM PEMANFAATAN SDA

Pada dasarnya ada dua jenis kaum jika diklasifikasi menurut ideologi lingkungan yang dipilihnya dalam memanfaatkan SDA yaitu Kaum *Technocentric* dan *Kaum Ecocentric* (Kerry *et. al.*, 1994 dan Pearce dan Turner, 1990). Keduanya berkarakter dan berposisi yang berlawanan. Kaum yang pertama berpedoman bahwa SDA merupakan *instrumental value* bagi manusia dalam membangun peradaban. Sebaliknya kaum yang ke dua memandang SDA sebagai *intrinsic*. Pada perkembangan berikutnya kedua ekstrim kiri dan ekstrim kanan ini kemudian masing-masing menjadi dua. Berikut merupakan karakteristik dari keempat kelompok tersebut.

2.3.1 Kelompok *Technocentric Conurpoian*

Dalam pandangan kaum antroposentrisme, istilah lingkungan secara generik dimaknai sebagai entitas atau segala hal yang berada di luar diri seseorang. Pandangan ini jika diterapkan untuk pengelolaan sumberdaya alam seperti sumberdaya hutan, maka secara kuat menurunkan perilaku individu yang sangat tamak atau *greedy* (lihat Kerry ddk., 1994) yang lebih lanjut pada perilaku yang eksplotatif demi untuk memenuhi keinginannya bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain pandangan dalam mensikapi (atau menilai) sumberdaya alam hanyalah sebagai alat (*instrumental value*) untuk memuaskan keinginan tiap individu manusia yang tidak bisa dibatasi atau pun dikekang itu. Keyakinan dari kelompok ini dalam menentukan keputusan untuk memanfaatkan SDA akan senantiasa terjebak pada orientasi untuk mengejar pertumbuhan (*progress trap*) seperti digambarkan oleh Hayami dan Godo (2006).

Mereka juga meyakini bahwa pasar bebas yang anti proteksionisme merupakan pilihan lebih lanjut agar eksplotasi SDA dapat memberikan manfaat yang terbesar, bahkan sepenuhnya individu tidak boleh dikekang dalam memanfaatkan SDA dengan mendaya gunakan kapital yang mereka miliki sampai sekarang ini. Menunda pemanfaatan SDA alam, bagi kaum ini, berarti telah mengorbankan *opportunity cost* yang besar yang mungkin tidak dapat dikompensasi dengan menggunakan apapun di masa mendatang.

Adapun mengenai adanya eksternalitas negatif (seperti emisi gas, erosi, banjir, sedimentasi, punahnya spesies dll) bagi mereka secara optimis

dapat menstabilkannya dengan menggunakan *man made capital* yang dapat dihasilkan oleh kemajuan Ipteks yang mereka ciptakan karena kecukupan kapital yang berhasil dicapai oleh peningkatan pendapatan (*baca: pertumbuhan ekonomi*) dalam mendanai remediasi atau pun dalam mendanai riset-riset substitusi.

Pada sebagian kelompok yang paling ekstrim dari kaum ini berkeyakinan jika misalkan ada spesies yang punah, katakanlah harimau Sumatera, maka di masa yang akan datang dapat diciptakan mutan melalui pengembangan bioteknologi yang dalam ekosistem fungsinya dapat mensubstitusi spesies yang punah tersebut. Begitu pula misalnya dengan lenyapnya lapisan *top soil* akibat erosi tanah ketika areal di kawasan hutan lindung dibuka, maka secara optimis kaum ini akan mampu menciptakan berbagai substrat biokimia yang mampu mempercepat proses pelapukan batuan dalam proses pembentukan tanah dengan kecepatan yang minimal seimbang dengan laju erosi tanah.

Kemampuan menciptakan Ipteks untuk substitusi elemen-elemen SDA yang rusak atau pun yang punah ini secara sangat optimis dapat dicapai karena tersedianya dana untuk riset yang merupakan rente ekonomi dari eksploitasi SDA yang sangat sangat massif tersebut. Kelompok ekstrim kiri ini, dalam tinjau ideologi lingkungan dikenal sebagai kaum atau kelompok *Technocentric_Conourcopian*.

Posisi dan sikap (*Green Label*) dalam memanfaatkan SDA seperti diuraikan tersebut juga berimplikasi pada kebutuhan ruang gerak aktivitas Tipe Perokonomian yang Anti perokonomian Hijau. Sering juga disebut *Red Economists* yang sangat optimis terhadap hasil-hasil ristek untuk memsubstitusi komponen ekosistem yang rusak ataupun yang punah tersebut. Dengan keyakinan (*belief*) ini, karakter kelompok ini secara ringkas berkarakter selain dicirikan oleh *Green Lable* dan Tipe Perokonomian (yaitu Strategi Manajemen, Pilihan Etika, dan Label Keberlanjutan dalam sistem sosial kemasyarakatan) dari kaum *T_Conourcopian* ini disajikan pada kolom paling kiri Tabel 1. Label keberlanjutan dari kelompok ini dengan demikian lemah.

2.3.2 Kelompok *Technocentric_Accomdating*

Derajat agak berkurang tensi terhadap eksploitasi SDA adalah pada kelompok *T_Accomdating*. Kelompok ini tidak pro pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga cukup mengontrol akan terjadinya kerusakan SDA maupun kepunahan habitat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dikendalaikan dengan membebankan pajak atas degradasi lingkungan untuk rehabilitasi kerusakan lingkungan menggunakan Ipteks yang ada. Kelompok ini juga dikategorikan sebagai kelompok masyarakat perekonomian hijau (*green economic*).

2.3.3 Kelompok *Ecocentric_Communist*

Pada derajat yang lebih ketat berikutnya adalah Kelompok *Ecocentric_Communist*. Dikenal sebagai kelompok *deep green economic*, menerapkan *Gaia Theorm* secara moderat, menekankan pentingnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan penduduk pada level yang tetap pada posisi *zero growth*, memandang SDA merupakan *intrinsic value*. Label keberlanjutan ideologi ini tergolong kuat (*Strong*).

2.3.4 Kelompok *Ecocentric_Deep Ecologists*

Ideologi yang berlawanan atau ekstrim kanan adalah pada Kaum *Ecocentric* kelompok *Deep Ecologists* [*E_Deep Ecologists*]. Seperti dapat dirujuk pada Tabel 1, ideologi kelompok ini memiliki justifikasi label keberlanjutan yang sangat kuat (*Very Strong*) dengan karakteristik: *very deeply green economy, negatively economics growth, negatively polulation growth, Gaia Theorm holder, intrinsic value bioethics*. Kelompok ini yang memperjuangkan *animal right* maupun *plant right* di berbagai negara Eropa Barat.

Tabel 2.1 Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di berbagai Belahan Dunia

Ideologi Kaum [Kelompok]	Technocentric		Ecocentric	
Karakteristik	[<i>T_Conurcopian</i>]	[<i>T_Accomodating</i>]	[<i>E_Communist</i>]	[<i>E_Deep Ecologist</i>]

Posisi dan Sikap dalam Pemanfaatan SDA (<i>Green Lable</i>)	Posisi kaum ini selalu pada orientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, berperilaku eksploitatif terhadap SDA	Posisi kaum ini pada pengkonversasi SDAL, berperilaku sebagai pengelola SDAL (memilah antara kelompok SDAL untuk pertumbuhan terhadap yang harus dilindungi)	Posisi kaum ini pada proteksi atau perlindungan penggunaan SDAL, sikap dan perilakunya sebagai preservationis yang mencegah pertumbuhan ekonomi	Posisi kaum ini ekstrim pada pencegahan pemanfaat SDA, sikap dan perilakunya menurunkan pertumbuhan ekonomi (<i>Extreme preservationist positioni</i>).
---	---	--	---	---

Tabel 2.1 Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di berbagai Belahan Dunia (Lanjutan)

Ideologi Kaum [Kelompok]	Technocentric		Ecocentric	
	[T_Conurcopian]	[T_Accomodating]	[E_Communist]	[E_Deep Ecologist]
Tipe Perekonomian	Anti perekonoi hijau, dan pasar bebas	Perekonomi hijau, pasar hijau (<i>green market</i>) yang dipandu menggunakan sistem insentif sebagai instrumen (misalya melalui pembebanan biaya polusi)	Perekonomian yang sangat hijau (<i>deep green economy</i>), kondisi perekonomian yang mapan dikendalikan menggunakan beberapa makroekonomi	Perekonomian yang sangat hijau sekali (<i>very deep economy</i>), diatur sangat ketat untuk meminimukan pemanfaat SDA.

<p>Strategi Pengelolaan</p>	<p>Tujuan dari berbagai kebijakan adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi (GNP). Menerapkan aksioma pasar yang sepenuhnya bebas dibarengi dengan kemajuan teknologi akan mampu melangsungkan substitusi maupun memitigasi semua kendala kelangkaan SDA (<i>Minimum environmental source & sinks</i>)</p>	<p>Menerapkan modifikasi pertumbuhan ekonomi (via modifikasi neraca perekonomian) dalam merancang GNP-nya Penting untuk menurunkan kebergantungan (<i>decoupling</i>) terhadap SDA melalui substitusi tetapi walau harus secara terbatas. Aturan keberlanjutannya adalah dengan melalui mempertahankan capital agar tetap konsisten sehingga skala ekonominya berubah.</p>	<p>Zero economy growth and Zero population growth <i>Decoupling</i> disertai dengan upaya mereduksi skala ekonomi. Prespektifnya secara sistem adalah bahwa kesehatan ekosistem secara utuh (keseluruhan) sangat penting sifatnya; perlu mengadopsi <i>Gaia Theorm</i> beserta implikasinya.</p>	<p>Keharusan untuk mereduksi skala perekonomian; secara kuat menerapkan <i>Gaia Theorm</i> bahwa setiap ada satu spesies yang punah hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh kehidupan di bumi.</p>
<p>Pilihan Etika</p>	<p>Pengusung alasan bebas etika klasik yaitu hak dan kepentingan individu sekarang (sentris pada manusia) harus dihargai; SDA itu merupakan instrumen untuk</p>	<p>Berkembang dari pilihan etika kaum <i>T_conurcopian</i> yaitu pemelihara SDA untuk kebutuhan generasi sekarang maupun generasi mendatang tetapi tetap SDA sebagai instrumen</p>	<p>Lebih berkembang dari pilihan etika kaum <i>T_Accomodating</i> yaitu kepentingan kolektif perlu didahulukan terhadap kepentingan individu, SDA</p>	<p>Penganut bioetika, SDA bernilai intrinsik, SDA (bahkan unsur abiotik) bukan diperuntukkan bukan bagi spesies manusia.</p>

Tabel 2.1 Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di berbagai Belahan Dunia (Lanjutan)

Ideologi Kaum [Kelompok]	Technocentric		Ecocentric	
Karakteristik	[T_Conurcopian]	[T_Accomodating]	[E_Communist]	[E_Deep Ecologist]

	mencapai keinginan tiap individu manusia	untuk mencapai tujuan manusia	selain dinilai sebagai instrumen bagi kepentingan umat manusia dan juga bernilai instrinsik bagi SDA itu sendiri, (valuable in own right regardless of human experience).	
<i>Label of Sustainability</i>	<i>Very Weak</i>	<i>Weak</i>	<i>Strong</i>	<i>Very Strong</i>

Sumber: Kerry *et. al.* (1994); Pearce dan Turner (1990)

2.4 IDEOLOGI LINGKUNGAN SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SMF

2.4.1 Urgensi Memilih Ideologi Lingkungan

Manajemen bukanlah merupakan *science* dan bukan pula suatu penerapan teknologi, melainkan seni (*the art*) dalam menerapkan kedua sumberdaya itu (Iptek) untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu komunitas tertentu pula. Stimson dan Stough (2008) menyebut manajemen sebagai suatu praksis (*praxis*) atau praktek yang dibimbing teori. Karakter dari seni, sangat berbeda dengan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam suatu manajemen, praktek seni lebih banyak bersifat intuitif, yang sebenarnya jauh lebih sulit dan lebih kompleks dari pada penerapan Iptek. Karena bersifat seni, maka *out put* dari setiap manajemen jarang mempunyai persisi yang tinggi. Tetapi beruntung, ketajaman intuisi dari seseorang dapat ditempa, diasah, dan diasuh (*nurturing*, lihat Gerrow, 1992) melalui praktek, pelatihan, pemagangan, simulasi, dan pengkayaan pengalaman melalui *emersion process* dalam menghadapi kasus-kasus aktual di bidang masing-masing. Berkaitan dengan itu, kemampuan manajerial dari seseorang, dengan demikian, sebenarnya merupakan proses pengembangan *expert system* yang kontinyu sifatnya. Dalam pandangan Stimson dan Stough (2008) proses akumulasi *knowledge capital*.

Di lain fi hak, dalam setiap ilmu pengetahuan (*science*), perilaku suatu fenomena (baik dalam fenomena alam maupun sosial) telah dapat

diteorikan (atau dideskripsikan atau pun dirumuskan) dengan persisi yang sangat tinggi, sehingga segala bentuk eksternalitas (baik yang bersifat menguntungkan atau pun yang merugikan) dapat diprediksi dan diidentifikasi dengan persisi yang tinggi pula. Dengan karakter Iptek yang seperti itu maka lebih lanjut penguatan (*amplifying*) terhadap dampak positif maupun proses mitigasi (*lessening*) terhadap dampak negatif dari suatu output manajerial dapat diupayakan dengan keyakinan yang tinggi pula. Karena itu pula, metode atau teknologinya yang efisien dan ekonomis yang diturunkan dari satu atau beberapa teori dapat dikembangkan dan diwujudkan serta dapat dimanfaatkan dengan relatif mudah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam *praxis* SFM.

Dalam konteks ini, dengan demikian, SFM dapat dimaknai sebagai praksis pemanfaatan Ipteks untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dari SDH secara berkesinambungan, baik untuk kepentingan individu maupun untuk masyarakat secara kolektif di suatu teritori dimana SDH tersebut berada. Dalam SFM kata keberlanjutan dari manfaat yang harus diperoleh maupun keberlanjutan dari hasil mitigasi maupun remediasi dan rehabilitasi terhadap dampak negatif menjadi tema sentral yang sangat urgen sifatnya untuk difahami dan diinternalisasikan kepada *mindset* para *policy maker*. Artinya akan menjadi suatu beban khusus (bagi setiap *policy maker*) karena pilihan terhadap suatu ideologi tersebut yang akan menjadi dasar bagi tahap operasionalisasi dalam setiap *praxis* SFM yang akan menjadi pedoman bagi para birokrat, sampai pada manajer SDH di tingkat tapak.

Selain itu, karena karakteristik kepemilikan atau penguasaannya dari setiap SDH tidaklah sepenuhnya dapat dibagi-bagi secara sempurna kepada individu-individu, maka manfaat (*good*) maupun mudarat (*bad*) yang dikandung didalamnya juga bersifat kolektif. Karena itu pula dalam terminologi tata pemerintahan di Indonesia hutan negara [HN] dikelompokkan sebagai barang publik (*public good*) yang hak penguasaannya berada pada pemegang otoritas kebijakan publik (*public*: pemerintah) yang harus bebas terhadap interest individu-individu ketika mendistribusikan manfaat dari barang publik (*public good*) seperti SDH tersebut. Begitu pula ketika menanggapi dampak negatif (mudarat alias *bad*) akibat eksploitasi SDH (seperti banjir, erosi, kekeringan, perubahan iklim,

kerusakan habitat, konflik manusia *vs* satwa liar dsb) pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik haruslah berperilaku adil, tidak terlibat dalam kepentingan pribadi, dan bertanggung jawab terhadap penanganan berbagai bentuk *public bad* tersebut.

Urgensi tersebut akan bertitik pangkal pada pilihan ideologi lingkungan yang harus dianut. Proses pemilihan ini akan menjadi beban mengingat kebersinambungan itu menyangkut ketidakpastian akan hasil yang mungkin dapat dicapai (yang sekaligus juga berarti dengan munculnya kemungkinan tidak dapat dicapai) di masa yang akan datang. Sementara berbagai teori *forecasting* tentang keadaan dimasa yang akan datang telah banyak dihasilkan oleh kaum ilmuwan dan juga teknologi *forecasting* pun sudah banyak tersedia sehingga prediksi akan keberhasilan bagi setiap program dalam praxis SFM dapat diramalkan melalui perencanaan untuk mencapai persisi hasil yang sangat tinggi. Namun begitu kehandalan dari perencanaan ini hanyalah akan dapat dibuktikan dalam masa yang akan datang persisinya, apalagi dalam konteks SFM memerlukan waktu yang relatif panjang terutama yang berbasis pada pengelolaan hutan alam konvensional penghasil kayu atau non kayu maupun yang berfokus pada rehabilitasi ekosistem yang melibatkan pemulihan viabilitas berbagai komunitas satwa liar (*wild life*).

Mengingat ideologi lingkungan merupakan suatu *belief* yang merupakan suatu kristal pemikiran dari berbagai praktek pengelolaan sumberdaya yang telah dipraktekkan di berbagai bangsa di berbagai belahan dunia, maka pilihan ideologi harus menjadi dasar pijakan setiap perencanaan yang harus diputuskan di level *policy maker* lebih awal sebelum melakukan perencanaan SFM bagi setiap jenis fungsi hutan. Langkah ini mempunyai kedudukan strategis berkaitan dengan distribusi keadilan baik antarindividu maupun antarspasial, baik di dalam generasi yang sama maupun antargenerasi, baik dalam mengakses manfaat maupun menanggungjawab terhadap mudarat (*public bad*) yang terjadi.

Eksplorasi maupun pengelolaan SDH dapat menyebabkan dampak pada kelangkaan bahkan pada kepunahan spesies tertentu. Bila seorang *planner* menjadi abdi seorang *policy maker* yang memilih ideologi *T*—

conucopian yang mengutamakan mengejar target pertumbuhan ekonomi (*baca*: penumpukan capital). Pilihan itu dapat menyediakan akses terhadap manfaat bagi individu atau bagi masyarakat sekarang, sedangkan kelangkaan spesies akibat praktek pengelolaan yang sangat eksploitatif tersebut tentu bebannya akan dipikul oleh generasi yang akan datang. Ketidakadilan antargenerasi seperti ini dapat terjadi terutama bila program penggunaan substitusi Iptek tentang pengembangan mutan misalnya kurang berhasil atau malah gagal seperti timbulnya mutan-mutan baru yang membahayakan seluruh kehidupan di muka bumi ini.

Demikian pula halnya atas pilihan ideologi lingkungan seperti itu dapat berimplikasi pada praktek pengelolaan SDH misalnya pengembangan hutan tanaman pada areal-areal dengan elevasi yang relatif tinggi dan dengan kemiringan lahan yang relatif besar di bagian hulu dari suatu DAS. Manfaatnya jelas akan dapat dinikmati oleh pemegang hak kelola dan juga oleh *public authority* melalui provisi maupun benefit lainnya dan mungkin masyarakat di wilayah hulu. Namun masyarakat di hilir dapat saja harus menanggung beban berupa banjir di musim hujan. Ketidakadilan antarspasial ini bisa mungkin terjadi terutama ketika program substitusi Iptek berupa introduksi teknologi konservasi tanah dan air gagal diterapkan berhubung mungkin ketrampilan masyarakat yang masih rendah misalnya. Ringkasnya pilihan ideologi lingkungan bagi *policy maker* sangat urgen untuk dikaji sebelum benar-benar diterapkan bagi pengembangan *praxis* SFM.

2.4.2 Pilihan Ideologi bagi Kelompok Fungsi Kawasan Hutan di Indonesia

1. Hutan Rakyat

Di luar fungsi hutan milik atau hutan rakyat [HR], sebagaimana yang dianut di banyak negara di berbagai belahan dunia lainnya, berdasarkan fungsinya kawasan hutan negara [HN] di Indonesia umumnya dikelompokkan ke dalam Hutan Konservasi [HK], Hutan Lindung [HL], dan Hutan Produksi [HP]. Mengingat *Green Lable*-nya yang antiperekonomiam hijau, implikasi pada perilakunya yang *progress trap* (*growth oriented*), penjujung pasar bebas yang radikal, dan pilihan etikanya pada *instrumental value* terhadap setiap SDH, maka pilihan ideologi *Technocentric_Conucopian*

secara kasar (*rule of thumb*) nampaknya belum bahkan tidak prospektif untuk dijadikan landasan bagi *praxis* SMF untuk ketiga jenis fungsi hutan ini di Indonesia.

Ideologi *Technocentric_Conurcopian*, yang ekstrim kiri ini nampaknya yang paling prospektif jika diterapkan pada hutan milik ataupun hutan rakyat [HR] yang dapat ditebang habis kayunya untuk dialihfungsikan menjadi penggunaan lain yang mempunyai rente lahan (*land rent*) yang lebih besar seperti untuk tanaman perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, untuk pemukiman, bahkan untuk kegiatan industri atau jasa-jasa yang rente lahannya sangat besar yang dapat mencapai pertumbuhan pendapatan (*baca*: pertumbuhan ekonomi) klimaks paling besar. Namun ketika sebelum ditebang ternyata teridentifikasi kasi sebagai habitat satwa liar yang dilindungi peraturan perundang-undangan seperti burung rangkong (*Buceros bicornis*), ular sanca (*Malayopython reticulatus*), trenggiling (*Paramanis javanica*) atau pun lainnya, maka Si Pemilik HR ini tidak berhak untuk mengambil manfaat ekonominya, malainkan wajib untuk melaporkan kepada BKSDA (sebagai otoritas publik) yang bertanggung jawab terhadap konservasi satwa liar di luar kawasan HN.

Artinya sekalipun hak-hak pribadi dalam kepemilikan HR begitu kuat, tetapi di dalamnya masih mungkin terkandung hak-hak publik di sini. Alasannya antara lain bahwa individu atau entitas lain seperti kaum *Ecocentric* memiliki hak atas kelestarian ketiga spesies satwa liar tersebut, karena kelompok *Ecocentric* ini berkeyanian bahwa jika ada satu saja spesies yang punah maka merupakan ancaman kepunahan ekosistem di muka bumi (*Gaia Theorm*) dalam merancang strategi pemanfaatan SDA. Begitu pula sekalipun tidak ditemukan satu atau beberapa spesies satwa liar, dalam konversi HR maka hak-hak publik harus tetap dijamin utamanya yang bakal menimbulkan mudarat bagi fi hak lain *public bad* seperti erosi, banjir, kelongsoran, bahkan cemaran udara seperti asap atau aroma tidak sedap.

2. Kawasan Hutan Konservasi

Terminologi konservasi di Indonesia agak berbeda dengan konservasi yang digunakan dalam klasifikasi ideologi lingkungan. Konservasi di Indonesia masih punya konotasi pada asas pemanfaatan bukan pelarangan.

Sedangkan dalam ideologi lingkungan punya konotasi pelarangan. Walaupun begitu sebenarnya kelompok kawasan Hutan Konservasi [HK] ini memang mempunyai kawasan yang dilarang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sebagai menghela pertumbuhan ekonomi yaitu Cagar Alam (CA) dan Suaka Alam (SA). Sedangkan Taman Nasional [TN], Taman Hutan Raya [Taharu] dan Taman Buru [TB] masih memberikan ruang pada upaya untuk menghela pertumbuhan ekonomi, sekalipun ini hanya terbatas pada zona pemanfaatan yang luasannya maksimal 5% saja.

Pada kawasan CA dan SA tentu saja patut seorang *policy maker* mempunyai *forest planner* yang berhaluan ideologi lingkungan *E-Deep Ecologist* dalam merancang SFM. Kepada kedua jenis elit inilah *Gaia syndrome failure* dapat diharapkan untuk dihindari. Implikasinya bahwa dalam merancang *praxis* SFM pada kedua kawasan ini, maka *policy maker* haruslah mengedalikan *planner*-nya untuk membuat target berupa: (a) reduksi luasan pada bagian kawasan yang telah dirambah atau telah dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi seperti rekreasi ataupun lainnya, dan (b) memulihkan kerusakan habitat pada SA. Minimal dengan kedua *praxis* seperti itu, maka pencegahan kerusakan ekosistem lebih lanjut maupun upaya pemulihannya dapat diharapkan relative cepat berhasil.

Pada kawasan TN, Tahura dan TB setidaknya *policy maker* maupun *forest planner* mengambil sikap pada posisi *E_Communist*, suatu sikap yang tidak seketat sikap kaum *E-Deep Ecologist*. Sikap ini dimungkinkan mengingat ketiga jenis fungsi kawasan ini punya alokasi untuk zona pemanfaatan untuk menghela pendapatan publik. Namun pemanfaatan tersebut haruslah tidak menjadi target kontibutor bagi target pertumbuhan ekonomi nasional ataupun ekonomi lokal. Arinya *praxis* untuk SFM yang harus dirancang: (a) pertumbuhan ekonomi sebagai hasil atau sebagai *rente* yang diperoleh melalui pendayagunaan zona pemanfaatan haruslah dipertahankan nol dari tahun ke tahun, dan (b) melakukan rehabilitasi habitat yang rusak atau pun yang telah dirambah.

3. Pada Hutan Lindung

Demikian pada kawasan hutan lindung [HL] baik *policy maker* atau pun *forest planner* seyogyanya juga bersikap pada posisi *E_Communist*. Argumentasi

yang dapat diajukan di sini bahwa sebenarnya kawasan HL juga berfungsi sebagai pelindung habitat yang berada di areal-areal dengan elevasi yang relative rendah, tidak terkecuali habitat manusia termasuk segala fasilitas budayanya seperti bendungan, waduk, saluran irigasi ataupun badan-badan perairan lainnya. Dengan demikian *praxis* yang harus dirancang SFM bagi kawasan HL juga sama dengan kawasan TN, Tahura dan TB.

4. Pada Hutan Produksi

Persolannya kemudian yang paling pelik adalah justru pada kawan HP. Kawasan ini memang di satu sisi harus memikul beban untuk berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Apalagi kawasan hutan di Indonesia yang selama ini memiliki luasan kawasan hampir 70% sejak lama jaman Kolonial tetapi kontribusi pada PDB/ha (Bakri, 2012) sangat jauh dari penggunaan di APL atau di luar kawasan hutan.

Namun sementara dengan kondisi Iptek yang belum dapat diyakini mampu untuk dapat melakukan substitusi secara penuh terhadap kerusakan atau kepunahan spesies, maka ideologi *T_Conurcopian* yang sangat bersifat *Red Economisc* (Tabel 2.1) bagi para *policy maker* atau pun para *forest planner* bukan merupakan pilihan dalam merancang SFM pada HP umumnya.

Pilihan yang paling vafourable sebenarnya adalah pada ideology *E_Comunalists* mengingat dalam HP pun masih mengemban fungsi ekologis yang merupakan domain public. Namun pilihan ini menjadi tidak realistis ketika mensyaratkan *zero economic growth & zero population growth*. HP memang tidak selayaknya dirancang untuk zero ecomoncs growth mengingat fungsi fungsi utamanya kawasan ini adalah untuk kegiatan produktif, menyerap pengangguran apalagi kepemilikan lahan rata-rata masyarakat tergolong sangat sempit, jika tidak maka perambahan akan sulit untuk dikendalikan dan kerusakan HP akan semakin parah khususnya untuk Pulau Kalimantan dan Sumatera, dua pulau terbesar dari sisi laju deforestasi tahunannya di Indonesia (lihat IFW, 2012).

Keadaan itu diperberat ketika persyaratan *zero population growth* yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh Indonesia yang sedang mengalami

transformasi struktural perekonomian nasional dari corak eksploitasi SDA ke industri pengolahan (Affandi, 2009). Sebagaimana yang dialami oleh hampir semua negara maju ketika dalam periode transisi seperti ini pendapatan masyarakat meningkat menyebabkan fertilitas meningkat dan akhir *zero population growth* sifatnya imposible untuk diraih (lihat Hayami dan Godo, 2005).

Karena itu pilihan ideologi yang paling realistis untuk merancang *praxis* SFM bagi kawasan HP di Indonesia umumnya adalah pada ideology *T_Accomodating*. Memang label keberlanjutan bagi pengembangan HP masih tergolong lemah jika menganut pilihan ideologi ini, tetapi sebagian rente ekonomi yang dihasilkan dari *praxis* SFM perlu untuk lebih banyak digunakan untuk membiaya substitusi teknologi, remediasi, serta rehabilitasi agar dapat menekan kerusakan lingkungan ataupun untuk pencegahan spesies yang hampir punah.

Dengan cara seperti itu maka dapat diharapkan SFM pada HP secara langsung dapat menyerap banyak pengangguran, membangkitkan berbagai kegiatan perekonomian (transportasi, industri hilir, wisata, dan jasa-jasa). Selanjutnya secara tidak langsung, kembali dapat menyerap pengangguran secara masal yang pada gilirannya dapat menurunkan perambahan hutan, yang berarti dapat meningkatkan keberlanjutan fungsi produksi pada kawasan HP.

Adapun langkah menyusun *praxis* SFM pada HP ini secara ringkas meliputi: (a) penghitungan pertumbuhan PDB yang dikontribusikan oleh HP per ha per tahun; (b) menghitung efek pengganda (*multiplier effect*) kepada pertumbuhan PDB sektor-sektor lain melalui analisis I/O setiap wilayah; (c) merancang *business plan* berbagai komoditas kehutanan yang bermuarakan pada pertumbuhan ekonomi per wilayah dimana HP terletak.

2.5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan yang dapat dibuat dari Bab 2 ini adalah bahwa pilihan Ideologi lingkungan yang adil untuk diadopsi oleh para *policy maker* maupun *forest planner* di Indonesia dalam merancang SFM dapat diwujudkan bagi masing-masing kawasan hutan [dengan *pilihan ideologinya*] adalah: (a) bagi

kawasan CA dan SM [*Ecocentric_Deep Ecologist*]; (b) TN, Tahura, TB dn HL [*Ecocentric_Communalists*]; dan (d) HP [*Technocentric_Accomodating*].

Adapun saran yang dipandang penting untuk direkomendasikan dari topik ini adalah bahwa di wilayah-wilayah yang memiliki kawasan hutan perlu melakukan analisis I/O antara pertumbuhan ekonomi di sektor kehutanan terhadap sektor-sektor lain: perkebunan, sektor pertanian pangan, sektor perdagangan, transportasi, wisata, industri, listrik, gas, air bersih, dan keuangan. Dengan begitu dapat terukur *multiplier effect* yang dibangkitkan oleh sector kehutanan kepada sector-sektor lainnya. Nilai ini dapat menjadi *feed back* (cocok-balik atau langkah retrospektif) dalam merancang *praxis* SFM sekaligus untuk meng_ *adjust* pilihan ideologi dalam pembangunan kehutanan di Indonesia ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. I. 2009. Peran agroindustri dalam perekonomian wilayah Provinsi Lampung: Analisis keterkaitan antarsektor dan aglomerasi industri. *Disertasi*, SPs IPB, Bogor.
- Bakri, S. 2012. Fungsi intrinsik hutan dan faktor endogenik pertumbuhan ekonomi sebagai determinan pembangunan wilayah Provinsi Lampung. *Disertasi*. SPS. IPB Bogor.
- FWI (Forest Watch Indonesia). 2012. Potret Keadaann Hutan Indonesia.
- Gerrow, G. 1992. *Psicology: An Introduction*. Johs Wiley & Sons. New York.
- Hayami, Y., dan Y. Godo. 2005. *Development Economics. From the Poverty to the Wealth of Nation*. 3rd. Ed. Oxford University Press.
- Kerry, T., D. Pearche, dan E. Rubienfeld. 1994. *Economics of Natural Resouce*. Simon & Shuster. Int. Group.
- Pearce, D. W. and R. K. Turner. 1990. *Economics of Natural Resources and The Environment*. Harvester Wheatsheaf. New York.
- Randall, A. 1987. *Resource Economics: An Economics Approach to Natural Resource and Environmental Policy*. John Wiley and Sons, NewYork.

Stimson, R. J. dan R. R. Stough. 2008. Changing approach to economics development: Focus on Endogenous Factors. *Working Paper*, Financial Development and Regional Economics, Regional Science Association International and Banco Central de la Republica Argentino.

-oo0oo-

